

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **I.1. Latar Belakang Masalah**

Menurut UU No.4 pasal 22 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman : pemukiman kumuh adalah pemukiman tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan/tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemukiman kumuh adalah tempat tinggal/hunian yang dibangun diatas tanah negara atau tanah swasta tanpa persetujuan dari pihak yang berkait dan tidak adanya atau minimnya sarana dan prasarana yang memadai yang kotor dan tidak layak huni serta membahayakan.

Bagi kota-kota besar di Indonesia seperti kota Medan, persoalan pemukiman kumuh merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang kronis dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Pemukiman itu sendiri adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, dapat merupakan kawasan perkotaan dan perdesaan, berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan kata “kumuh” menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai kotor atau cemar. Jadi, bukan padat, rapat becek, bau, reyot, atau

tidak teraturnya, tetapi justru kotornya yang menjadikan sesuatu dapat dikatakan kumuh.

Kawasankumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Kawasan kumuh dapat ditemui di berbagai kota besar di dunia. Kawasan kumuh umumnya terlihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi. Kawasan kumuh dapat pula menjadi sumber masalah sosial seperti kejahatan, obat-obatan terlarang dan minuman keras. Di berbagai negara miskin, kawasan kumuh juga menjadi pusat masalah kesehatan karena kondisinya yang tidak higienis. Di berbagai kawasan kumuh, khususnya di negara-negara miskin, penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan seperti ambulans dan pemadam kebakaran.

Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat : Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Namun kondisi kumuh tidak dapat digeneralisasi antara satu kawasan dengan kawasan lain karena kumuh bersifat spesifik dan sangat bergantung pada penyebab terjadinya kekumuhan. Tidak selamanya kawasan yang berpenduduk jarang atau kawasan dengan mayoritas penghuni musiman/liar masuk dalam kategori kumuh. Kerenanya penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada. Anak-anak yang tinggal di kawasan yang kumuh akan terganggu kesehatan dan kenyamanan tempat tinggal karena kelalaian pemerintah yang tidak

memperhatikan dan memperdulikan akan kebersihan lingkungan negaranya bagi rakyat-rakyat.

Pemukiman kumuh adalah tempat tinggal/hunian yang kotor. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya dengan pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan, sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalanan kota. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterakan.

Dengan adanya perkembangan pembangunan dan ekonomi di daerah perkotaan seperti Kota Medan, mengundang masyarakat untuk datang mencari pekerjaan yang layak, sembari mencari pekerjaan, mereka mencari tempat tinggal yang murah dan terkategori kumuh, hal ini lah yang kemudian melatarbelakangi peneliti mengambil tema penelitian ini yaitu: *Pemukiman Kumuh di Bantaran*

*Sungai Deli Kelurahan Labuhan Deli”.*

## **I.2. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka masalah dalam penelitian ini di batasi dalam tiga hal:

1. Latar belakang masyarakat yang bertempat tinggal di bantaran Sungai Deli Kelurahan Labuhan Deli.
2. Cara yang dilakukan masyarakat dalam mendapatkan tempat di bantaran sungai Deli di kelurahan Labuhan Deli.
3. Alasan menyebabkan bertahan di bantaran sungai sungai Deli sampai saat ini.

### **I.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas , maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakang masyarakat berdomisilidi bantaran sungai Deli di Kelurahan Labuhan Deli?
2. Bagaimana strategi adaptasimasyarakat bisa mendapatkan tanah di bantaran sungai Deli di kelurahan Labuhan Deli?
3. Apa yang menyebabkan masyarakat bertahan dibantaran sungai Deli di Kelurahan Labuhan Deli?
4. Bagaimana penanganan keberlangsungan masyarakat di bantaran sungai Deli?

### **I.4. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguraikan latarbelakang masyarakat berdomisili di bantaran sungai Deli
2. Untuk mengetahui cara masyarakat mendapatkan tempat di bantaran sungai.

3. Menggambarkan hal yang mendorong masyarakat memilih bertahan di bantaran sungai Deli.
4. Mencari solusi dalam menangani permasalahan permukiman kumuh dibantaran sungai Deli

#### **I.5. Manfaat penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan bisa memeberikan hasil yang bermanfaat dan memberi kontribusi secara ilmiah bagi perkembangan ilmu Antropologi Pembangunan
2. Dapat juga dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai bahan pembelajaran terutama bagi masyarakat di kawasan permukiman kumuh.
3. Dan diharapkan penelitian ini juga bisa memberi masukan dan bahan evaluasi bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara.

